

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN  
TRANSPORTASI SEKOLAH SMP NEGERI 01 BURU DI KECAMATAN  
BURU KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh:**

**Muhammad Ikbal Oktavian**

**NIM. 2105010022**

**[ikbaloktavian263@gmail.com](mailto:ikbaloktavian263@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Kecamatan Buru di Kabupaten Karimun merupakan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan dalam aksesibilitas pendidikan. Keterbatasan infrastruktur, dan minimnya transportasi umum menjadi hambatan utama bagi siswa untuk bersekolah secara aman dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi sekolah di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Camat Buru, dan orang tua siswa. Penelitian ini menggunakan teori *Responsibility* Helbert J. Spiro (1969) yang mencakup tiga indikator: akuntabilitas, kewajiban, dan penyebab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum optimal. Rendahnya akuntabilitas tercermin dari lemahnya koordinasi dan kurangnya pengawasan terhadap kebutuhan transportasi siswa. Kewajiban pemerintah juga belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret atau penyediaan sarana transportasi seperti bus sekolah, meskipun kebutuhannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk SMP Negeri 01 Buru. Faktor penyebab utamanya meliputi keterbatasan anggaran, hambatan geografis, dan lemahnya sinergi antarinstansi. Kesimpulannya, diperlukan komitmen lebih besar dari pemerintah daerah melalui perencanaan anggaran khusus, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan masyarakat untuk menjamin akses pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh siswa di wilayah terpencil seperti Kecamatan Buru. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan anggaran khusus, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan masyarakat guna mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di daerah terpencil.

Kata kunci: Tanggung jawab, transportasi, daerah terpencil.

## **Local Government's Responsibility in the Provision of School Transportation at SMP Negeri 01 Buru, Buru Subdistrict, Karimun Regency**

*By:*

**Muhammad Ikbal Oktavian**

**NIM. 2105010022**

**[ikbaloktavian263@gmail.com](mailto:ikbaloktavian263@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*Buru Subdistrict in Karimun Regency is an archipelagic area that faces serious geographical challenges, particularly in terms of educational accessibility. The long distances between settlements and schools, limited infrastructure, and minimal public transportation are the main obstacles for students to attend school safely and on time. This study aims to analyze the extent of the local government's responsibility in providing dedicated school transportation in the area. A descriptive qualitative approach was used, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of officials from the Department of Education, Department of Transportation, Buru Subdistrict Head, and parents of students. The study applies Helbert J. Spiro's (1969) theory of responsibility, which includes three key indicators: accountability, obligation, and causation. The results show that the local government has not yet optimally fulfilled its responsibilities. Low accountability is reflected in weak coordination and inadequate supervision regarding student transportation needs. The government's obligation has not materialized in the form of concrete policies or the provision of transportation facilities such as school buses, even though such needs are urgent, especially at SMP Negeri 01 Buru. The main causal factors include budget limitations, geographical constraints, and weak inter-agency collaboration. In conclusion, stronger commitment from the local government is required through special budget planning, cross-sector collaboration, and community involvement to ensure equal and fair access to education for all students in remote areas like Buru Subdistrict. This study recommends the necessity of dedicated budget planning, cross-sector partnerships, and community participation to realize equal access to education for all students in remote areas.*

**Keywords:** *Responsibility, transportation, remote areas.*